

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian menggunakan referensi dari penelitian terdahulu untuk dijadikan perbedaan atau rujukan dalam melakukan penelitian adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Muh. Ridwan Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda, dengan judul Implementasi Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, wawancara dan dokumentasi, Tujuan dan Fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang pembinaan industri Kecil dan Menengah di Kota Bontang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan industri kecil dan menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang secara umum sudah berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat terhadap pengembangan usaha pelaku IKM, namun secara aplikatif namun hasil yang dicapai belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal. Meski demikian upaya pembinaan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang terhadap IKM terus dilakukan secara berkesinambungan serta berjalan dengan baik. Adapun faktor yang menghambat terhadap pembinaan industri kecil dan menengah pada Dinas perindagkop dan UMKM Kota Bontang adalah kurangnya jumlah aparat Pembina IKM khususnya tenaga penyuluh dan pendamping, sebagian aparat Pembina IKM yang ada di Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang tidak sesuai dengan kompetensi (basic pendidikan yang dimiliki), terbatasnya kemampuan aparat pembina IKM, terbatasnya alokasi anggaran untuk keperluan kegiatan pembinaan IKM sehingga tidak semua program kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana, adanya sikap dan perilaku IKM yang terkesan manja sehingga selalu mengharapkan bantuan pemerintah, karakteristik dan pola pikir pelaku IKM tidak mudah untuk berubah, kurangnya perencanaan secara matang dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Penelitian oleh Dian Kharisma Putri, Ilmu Administrasi Universitas Lampung, dengan judul Implementasi Strategi Dinas Koperasi Dan Ukm Dalam Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi Yang Tangguh, Mandiri, Dan Maju Di Kota Bandar Lampung (studi Pada Dinas Koperasi Dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif , wawancara dan dokumentasi, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa; 1) pelaksanaan strategi Dinas Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi. 2) kendala-kendala Dinas Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan strategi. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 1) pelaksanaan program yang ada pada renstra ini belum sukses dikarenakan dinas koperasi belum bisa mencapai target tahunan yang sudah ditetapkan. 2) berdasarkan kebijakan revitalisasi Dinas Koperasi hanya dapat menghidupkan 3 unit koperasi yang sudah tidak aktif menjadi aktif dan membangun 10 unit koperasi baru di Bandar Lampung. 3) mengadakan pembinaan, pelatihan/penyuluhan sosialisasi untuk seluruh koperasi di Bandar Lampung. 4) Dinas Koperasi dan UMKM hanya memiliki sumber daya manusia berjumlah 43 orang saja. Kendala yang dialami oleh Dinas Koperasi adalah anggaran dan sumber daya manusia yang terbatas. Peneliti merekomendasikan beberapa hal, yaitu: 1) seharusnya kegiatan pelatihan/penyuluhan mengundang seluruh koperasi di Bandar Lampung secara merata. 2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengadakan kegiatan

penyuluhan tentang manajemen perkoperasian dalam 3 kali setahun. 3) Dinas Koperasi dan UMKM hendaknya melakukan kerjasama dengan salah satu bank yang ada di Bandar Lampung.

3. Penelitian oleh Hanifah Rakhman Pangestu, Universitas Pasundan Bandung Jurusan Ilmu Administrasi Negara, dengan Judul Implementasi Kebijakan Dinas Koperasi, ukm Dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung Studi : Umkm Sentra Industri Kaos Suci Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (mea) Teknik pengumpulan penelitian kualitatif menurut Creswell. teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi non partisipan, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Dinas koperasi, UKM dan perindustrian dan perdagangan kota Bandung dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terhadap sentra-sentra industri kota Bandung khususnya sentra industri kaos suci. peneliti mengemukakan bahwa Implementasi Kebijakan Dinas Koperasi, UKM dan perindustrian perdagangan kota Bandung studi : UMKM sentra industri kaos suci dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) belum efektif dan maksimal, hal ini dapat dilihat berdasarkan kebijakan-kebijakan yang sudah berjalan dan belum berjalan, akan tetapi pemerintah tetap mendorong dan mendukung sentra-sentra industri kota Bandung khususnya sentra industri kaos suci agar siap dan mampu bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan salah satu cara membuat pelatihan- pelatihan, pameran, serta memudahkan perijinan.
4. Munawar Noor (2014) dengan judul Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia (studi tentang program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan di kota semarang) menjelaskan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah melalui kebijakan pembuatan program. Pengalaman lapangan banyak memberikan gambaran bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat sering menimbulkan resistensi tidak saja pada pejabat pelaksana kebijakan tetapi juga sinergi kelembagaan program dengan pemerintah daerah serta kelompok sasaran, sehingga kebijakan tersebut tidak dapat di implementasikan dengan baik. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan didukung metode triangulasi dalam analisisnya, lokasi penelitian Kota Semarang yang meliputi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan berdasarkan sampel bertujuan. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kelembagaan PNPM-MP di Kota Semarang, dalam banyak hal berjalan baik, namun masih terdapat kelemahan seperti peran masyarakat yang dianggap sebagai alat bantu mekanisme keproyekan, proses pembelajaran hanya bersifat formalitas. Kendala dan tantangan yang dihadapi pemerintah adalah keterbatasan anggaran untuk memenuhi hak-hak dasar warga Negara, sehingga diperlukan kemauan politik yang kuat dari pemerintah serta membangun kemitraan dan kerjasama kelembagaan (pemerintah, masyarakat, dunia usaha) untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan.
5. Penelitian oleh Yunita Eka Rizki Lestari, Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, dengan judul Implementasi Pelatihan Kewirausahaan Bagi Usaha Sarung Alat Tenun Bukan Mesin Desa Semampir Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil pada Usaha Sarung Alat Tenun Bukan Mesin di Desa Semampir Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah Staf Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik. Bahwa Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan di Desa Semampir,

sudah berjalan baik, meskipun masih terdapat kendala. Hal tersebut diketahui melalui variabel standar dan tujuan masih belum tercapai yaitu masyarakat kurang faham mengenai tujuan sehingga kurangnya antusias dalam mengikuti kegiatan pelatihan. Pada variabel hubungan antar organisasi pelaksana sudah terbilang cukup baik sehingga terbentuk koordinasi yang baik pula. Pada karakteristik agen pelaksana, para implementor terbilang sangat baik karena tugas yang diberikan telah dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan pada variabel kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat terus mengharapkan bantuan dari pemerintah padahal Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan telah memfasilitasi jalur kemitraan dan permodalan melalui Bank maupun Perusahaan ternama. Pada variabel disposisi, para implementor memiliki respon mendukung dan positif terhadap adanya kegiatan pelatihan kewirausahaan. Saran untuk penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan yakni harus diadakannya sosialisasi mengenai tujuan kegiatan serta informasi alur mengenai kemitraan dan permodalan agar masyarakat lebih berantusias, kemudian ditambahkan lagi anggaran pada kegiatan pelatihan kewirausahaan ini supaya adanya pendampingan untuk menindak lanjuti dan tujuan kegiatan tercapai.

6. Penelitian oleh Dosen Universitas Negeri Gorontalo, dengan judul Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di kota Gorontalo, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, wawancara dan focus group discussion (FGD). Adapun Focus Penelitihannya adalah mengetahui dan menganalisis tingkat responsivitas pemerintah kota Gorontalo dalam implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, mengetahui dan menganalisis tingkat keberterimaan masyarakat terhadap kebijakan program penanggulangan kemiskinan, dan mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo telah dilaksanakan sesuai tahapan kebijakan P2KP, responsivitas pemerintah Kota Gorontalo tinggi dalam implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, masyarakat menerima dan mendukung program penanggulangan kemiskinan, dan faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan P2KP di Kota Gorontalo.

## **2.2 Pembangunan**

Pada hakekatnya pembangunan secara umum memiliki pemahaman sebagai proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Menurut W.W Rostow dalam bukunya "*The Stage of Economic*" (1960) memberikan penjelasan bahwa pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.

Pembangunan jika dilihat dalam bidang sosial pada umumnya mengarah pada pengembangan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Termasuk mengembangkan motivasi dalam gairah usaha yang bersifat produktif. Lebih dari itu yang terpenting adalah proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi yang semakin berkembang. Terdapat dua unsur pokok dalam pembangunan yang perlu kita ketahui. Pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan

kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Pada dasarnya tujuan dari pembangunan harus bermuara kepada pembangunan manusia, manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut. Pembangunan juga bisa dikatakan sebagai proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan mengarah mendekati ke keadaan tata masyarakat yang dicita-citakan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam proses transformasi, yaitu keberlanjutan (*continuity*) dan perubahan (*change*). Dari dua hal tersebut akan menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat.

Menurut Rostow (1960) transformasi dari negara yang terbelakang menjadi negara maju dapat dijelaskan melalui suatu urutan tingkatan atau tahap pembangunan yang dilalui oleh semua negara. Rostow mengemukakan lima tahap yang dilalui oleh suatu negara dalam proses pembangunannya yaitu;

1. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang belum mengetahui teknologi modern, tetapi masih mengandalkan tenaga fisik. Sektor utamanya masih berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan peternakan.
2. Persiapan menuju tingkat landas merupakan masyarakat yang mulai banyak menggunakan ilmu dan teknologi modern untuk menuju negara industri.
3. Tinggal landas merupakan pertumbuhan ekonomi meningkat dengan prioritas pembangunan disektor industri.
4. Masyarakat dewasa merupakan masyarakat menggunakan teknologi modern untuk melakukan semua aktivitas ekonominya.
5. Masa tingginya konsumsi masyarakat merupakan masyarakat memiliki tingkat konsumsi yang tinggi untuk produksi barang dan jasa.

Fokus utama pembangunan yang berpusat pada manusia adalah memandang manusia sebagai warga masyarakat dimana pembangunan dapat dipandang sebagai suatu strategi alternatif yang saling melengkapi diantara pembangunan bidang-bidang lain, khususnya bidang ekonomi. Masyarakat dengan demikian merancang dan mengelola proyek mereka sendiri berdasarkan kebutuhan, kemampuan, dan penguasaan atas sumberdaya dan nasib mereka sendiri yang tidak bergantung pada birokrasi dan program serta proyek yang dirancang dan dikelola secara terpusat. Sementara itu peranan pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan untuk berkembang yaitu lingkungan sosial yang mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi potensi manusia secara lebih besar.

## **2.3 Administrasi Publik**

### **2.3.1 Pengertian Administrasi Publik**

Administrasi Publik merupakan terjemahan dari istilah Administrasi Negara. Istilah ini lahir sekitar tahun 1956 bersamaan dengan lahirnya Lembaga Administrasi Negara atau biasa disingkat LAN. Secara etimologis, istilah administrasi publik berasal dari kata *public* yang berasal dari bahasa latin "*poplicus*" yang bermula dari kata "*populous*" atau "*people*" yang dalam bahasa Inggris memiliki arti rakyat. Kemudian "*administration*" yang juga berasal dari bahasa latin, yang terdiri dari kata "*ad*" yang artinya intensif dan "*ministrare*" artinya melayani. Jadi secara etimologis administrasi berarti melayani secara intensif.

Menurut Pfiffner dan Presthus yang dikutip Syafii (2010: 23) memberikan penjelasan mengenai administrasi negara sebagai berikut:

- a. Administrasi Negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.

- b. Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
- c. Secara ringkas, Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap sejumlah orang

Sedangkan menurut Dwight Waldo masih dalam Syafii (2010: 25) mengemukakan bahwa: "Administrasi Publik manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah".

Objek disiplin ilmu administrasi negara adalah pelayanan politik sehingga yang perlu dikaji adalah keberadaan berbagai organisasi politik. Maka Llyod D. Musolf dan Harold Seidman dalam tulisan mereka berjudul "the blurred boundaries of public administration" didalam buku "Ilmu Administrasi Publik" Syafii (2010: 23) melihat pada batasan-batasan administrasi publik. Hal ini karena bagi mereka tampak bahwa setiap keadaan yang bertambah maju, pemerintah pada semua tingkat memberi tanggung jawab aktivitas yang penting dan kompleks, namun ada lembaga yang semu. (apakah yang bersangkutan termasuk lembaga administrasi pemerintah atau swasta). Kecendrungan ini dicerminkan dalam kegiatan pemerintah mensponsori perusahaan swasta, badan hukum yang tidak mencari keuntungan dari pusat-pusat penelitian kontrak. Untuk itu kita harus melihat kepada siapa *responsibility* dan *accountability* disampaikan.

Pemahaman selanjutnya dari buku Gerald E. Caiden yang berjudul "public administrations" (Syafii: 2010: 26) memberikan patokan untuk menentukan apakah suatu organisasi tersebut pemerintahan adalah dengan melihat tiga hal, yaitu: organisasi dibentuk dengan peraturan pemerintah, pegawai disebut pegawai negeri, dan pembiayaan berasal dari uang rakyat. Namun beberapa poin kekhususan dari Administrasi Publik sendiri telah disebut Inu Kencana Syafii dalam bukunya "Ilmu Administrasi Negara" (2010: 26) yaitu Administrasi Publik tidak dapat dielakkan (*unavoidable*), senantiasa mengharapkan ketaatan (*expect obedience*), mempunyai prioritas (*has priority*), mempunyai pengecualian (*has exceptional*), puncak pimpinan politik (*top management political*), sulit diukur (*difficult to measure*) sehingga kita terlalu banyak mengharap dari Administrasi Publik ini (*more is expected of public administration*).

Melihat corak berfikir dalam penelitian ini diperlukan suatu paradigma administrasi Negara. Thomas S. Kuhn (Syafii: 2010: 26) mengatakan bahwa paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah, yang dianut suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Kemudian ditambahkan oleh Robert T. Golembiewski (Syafii: 2010: 27) menganggap bahwa standar suatu disiplin ilmu dilihat dari fokus dan lokusnya. Fokus mempersoalkan apa kajian atau cara bagaimana memecahkan persoalan, sedangkan lokus mempersoalkan dimana lokasi atau medan penerapan suatu ilmu pengetahuan.

Fokus dari penelitian ini adalah manajemen dimana proses mulai dari perencanaan sampai pengawasan yang akan menjadi fokus. Sementara Lokus atau tempat dimana administrasi publik berada dalam penelitian ini adalah pembangunan yang menuju pada perubahan dan berkelanjutan melalui program-program untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

## 2.4 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memengang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures (Hakim, 2002). Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi

1. pembuatan kebijakan,
2. pelaksanaan dan pengendalian, serta
3. evaluasi kebijakan.

## 2.5 Teori Implementasi Kebijakan

implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Van Meter Van Horn (dalam Leo Agustino, 2006:139) menyatakan, “implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan” Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan yaitu :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.

2. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksana. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan *eksternal* turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kondusifitas kondisi lingkungan *eksternal*.

## 2.6 Smart Governance

Secara umum Smart Governance dapat dianalisis melalui fokus aktivitasnya yaitu tingkat partisipasi masyarakat, transparansi informasi, dan kolaborasinya. Smart Governance berfokus pada:

1. Partisipasi warga negara (*citizen participation*) di dalam urusan pemerintahan institusi pemerintah diperlukan terlibat untuk melibatkan publik untuk perbaikan keputusan melalui penyebaran secara luas pengetahuan dan meningkatkan partisipasi publik di dalam pemerintahan

2. Transparansi informasi (*information transparency*) di dalam pemerintahan institusi pemerintah diperlukan untuk menggunakan teknologi guna memasukkan informasi mengenai keputusan e-governance dan operasional online dan di dalam ketersediaan forum kepada public.
3. Kolaborasi (*collaboration*) peran pemerintahan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada warga negara. Institusi pemerintah diperlukan untuk menggunakan sarana inovasi, metode, dan sistem yang inovatif untuk bekerjasama diseluruh level pemerintahan dan melibatkan public di dalam kegiatan pemerintahan (Rubel, 2011)

## 2.7 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan istilah yang sering didengar dan baca di berbagai media massa akan tetapi tak banyak orang yang tahu tentang kriteria peluang usaha yang bisa dikategorikan sebagai UMKM. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini
3. Yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah kegiatan usaha dengan skala aktivitas yang tidak terlalu besar, manajemen masih sangat sederhana, modal yang tersedia terbatas, pasar yang dijangkau juga belum luas
4. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, UMKM memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 3000.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni :
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar limaratus juta rupiah).

## **2.8 Pahlawan Ekonomi**

Pahlawan Ekonomi adalah program yang di rancang oleh pemerintah Kota Surabaya untuk menangani kemiskinan di Kota Surabaya tanpa mengambil Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ada di Kota Surabaya, Pahlawan Ekonomi di desain secara khusus dan inklusif pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan tujuan pokok dan fungsi sebagai wadah Usaha Mikro Kecil dan Menengah kota Surabaya. Program ini berupaya memberi pendampingan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sejak tahap awal bimbingan mental, pembuatan produk, pengemasan, pemasaran, hingga promosi.

Ada sinergitas dengan pihak-pihak eksternal yang membuat produk UMKM warga Surabaya bisa Go Global, Go Digital, dan Go Financial, daerah Putat Jaya dulunya yang terkenal sebagai daerah lokalisasi kini diubah oleh bu risma sebagai daerah Industri Kecil dan Perdagangan , ada 5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang aktif di Pahlawan Ekonomi , salah satunya Rumah Produksi Mampu Jaya , Rumah Produksi Mampu Jaya berlokasi di Jalan Kupang Gunung Timur I No. 20-22 , dimana lokasi ini adalah daerah yang paling terpuruk setelah ditutupnya lokalisasi Dolly , tetapi kini Bu Risma telah mengubahnya menjadi pusat Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan penghasilan ratusan juta Rupiah perbulannya, dengan mengajak orang sekitar untuk gabung dengan pahlawan ekonomi .

### **2.8.1 Prinsip Dasar**

- a. Membantu dengan Hati
- b. Partisipatoris Deliberatif
- c. Perspektif Gender
- d. Transparan dan Akuntabel
- e. Keterpaduan
- f. Keberlanjutan (Sustainability)

### **2.8.2 Ruang Lingkup**

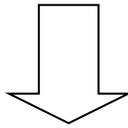
Ruang Lingkup Kegiatan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) antara lain:

1. Verifikasi & Fasilitasi Pengaugajuan Gabung anggota;
2. Fasilitasi Bantuan Untuk Anggota Pahlawan Ekonomi;
3. Peningkatan Untuk Anggota Pahlawan Ekonomi;
4. Pemberdayaan Anggota Pahlawan Ekonomi;
5. Pelatihan Dan Pendampingan Program;

## **2.9 Kerangka Dasar Pemikiran**

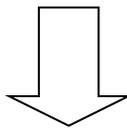
Kerangka dasar pemikiran dalam penelitian ini digunakan agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam pemahaman terhadap tulisan, dimana ditulis batasan-batasan pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasannya. Penelitian ini menggunakan Enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn (2006), yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan yaitu Penulis dengan prinsip dasar Program Pahlawan Ekonomi. Sehingga dapat kita lihat dalam tabel seperti berikut:

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah diturunkan ke :  
Peraturan Walikota Surabaya No 21 Tahun 2008 Tentang Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro Dan Usaha Dengan Menyediakan Dana bergulir Pengembangan Usaha Koperasi, Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Di Kota Surabaya



Indikator Memakai Teori Van Meter Van Horn :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.
2. Sumber daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana.
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.



Pelaksanaan Program Pahlawan Ekonomi Dalam Peningkatan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Sentra Usaha Mikro Kecil Menengah Putat Jaya Surabaya

Gambar 2.1 Kerangka Dasar Pemikiran